

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4 kepariwisataan bertujuan untuk : (a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (c) menghapus kemiskinan, (d) mengatasi pengangguran, (e ) Melestarikan lingkungan dan sumber daya (f) Memajukan kebudayaan (g) mengangkat citra bangsa (h) memupuk rasa cinta tanah air (i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan , (j) mempererat persahabatan antar bangsa (UU No 10 Tahun 2009).

Banyaknya tujuan kepariwisataan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang, maka Kepariwisata di Indonesia diharapkan berperan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dipesankan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Data BPS 2010-2020 Kontribusi sector pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru berkisar antara 3,05-4,1%. Dengan demikian berdasarkan data ini sector pariwisata belum berperan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Disisi lain sector pariwisata dipandang sebagai suatu potensi yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan berbagai aktifitas social ekonomi dan budaya sehingga mampu menjadi salah satu sector yang memimpin (*leading sector*) untuk pembangunan di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sumberdaya yang potensial sebagai objek wisata. Baik berupa keindahan alam, keragaman budaya dan beragam keunikan biodiversity yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestic maupun mancanegara.

Sejalan dengan strategi pembangunan Indonesia Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, dicanangkan membangun Indonesia dari pinggiran. Oleh sebab itu pada sector pariwisata mengembangkan desa wisata adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Menurut BPS 2018, Indonesia memiliki 83.931 desa, dari jumlah total desa tersebut, 1734 (2,06%) merupakan desa wisata

Dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat (2016-2021) sector pariwisata merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparaturnya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Sumatera Barat maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat pun sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2016-2021 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terletak pada Misi 4 yaitu “meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”, yang salah satu tujuannya adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya. Sedangkan sasaran yang dituju dari misi 4 ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat tahun 2017-2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat, Meningkatnya lama tinggal wisatawan, Meningkatnya pertumbuhan industri

pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, dan. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Strategi yang digunakan dalam mencapai pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat tahun 2017-2021 yaitu mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada objek wisata, meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif (ekraf), meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel

Kabupaten Agam merupakan salah satu destinasi Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang tinggi. Wilayah Ini memiliki Danau Maninjau, Gunung Singgalang, yang merupakan potensi wisata alam. Selain itu juga terdapat wisata budaya seperti Peninggalan Rumah Buya Hamka. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Agam dalam RPJP dan RPJM tahun 2021-2026 menempatkan sector pariwisata sebagai *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* dalam pembangunan daerah.

Salah satu kebijakan di Sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, menempatkan desa wisata sebagai salah satu strategi untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Agam. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 313 tahun 2021 terdapat 21 Nagari wisata di Kabupaten Agam, 6 diantaranya dinominasikan untuk menerima Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022.

Dalam pengembangan Sektor pariwisata, Peran pemerintah menjadi salah satu yang *urgent* sebagaimana dikemukakan dalam konsep *Pentahelix* pengembangan sector pariwisata yang dikemukakan oleh Yahya.A (2016) Peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata di diharapkan mampu memberikan kemudahan melalui kebijakan yang dapat dilaksanakan serta mampu mendukung semua stakeholder. Dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata, diperlukan suatu kordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pihak bisnis/privat, komunitas, akademisi, serta media.

Peran Pemerintah Kabupaten Agam menurut LKIP Tahun Anggaran 2018 yaitu pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata, menjalin kerjasama dan mitigasi bencana, meningkatkan pemasaran dan publikasi pariwisata daerah,

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Agama telah berhasil meningkatkan sarana dan prasana objek wisata yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasana objek wisata Linggai, Pembangunan sejuta janjang, Sarana Olahraga Tbek Sari'an, OW Pasia Tiku, dan pemeliharaan objek wisata. Hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana objek wisata dalam rangka asli daerah dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Agam menurut LKIP Tahun Anggaran 2018 dalam meningkatkan bidang pariwisata yaitu Meningkatkan SDM aparatur dan seluruh Stake Holders Pariwisata, Memanfaatkan objek wisata utama seperti Danau Maninjau, Puncak Lawang, Museum Buya Hamka yang sudah dikenal di Nusantara dan Manca Negara sebagai strategis dalam promosi, Memberdayakan dan memanfaatkan asosiasi yang bergerak di bidang Pariwisata, Meningkatkan promosi Pariwisata melalui pameran, event pariwisata, road show, serta media cetak dan elektronik, Meningkatkan kerjasama dengan Istansi terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta yang bergerak di bidang Jasa Usaha Pariwisata Seni dan Budaya dan lainnya.

Pemerintah Nagari untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebijakan pembangunan nagari. Arah kebijakan pembangunan nagari adalah hasil dari pengkajian secara komprehensif terhadap potensi dan masalah nagari, visi, misi dan strategis pembangunan nagari yang akan menghasilkan program dan kegiatan prioritas bagi Nagari untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kemandirian Nagari. Berdasarkan penelitian Fauzi dan Jumiati (2021) peran pemerintah nagari berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sekretaris nagari Kamang Hilia menyatakan bahwa: Pemerintah nagari Kamang Hilia dalam pengelolaan objek wisata Lubuk Linggau telah berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan masyarakat, investor, dan juga pengusaha dibidang pariwisata. Namun masih ada kekurangan yang harus ditingkatkan.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka timbul pertanyaan umum, apakah Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari pada Nagari Wisata sudah berperan secara Optimal ?. Untuk menjawab pertanyaan ini akan dilakukan

penelitian dengan judul: **Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam**

### **B. Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini dibatasi pada beberapa nagari wisata, supaya penelitian ini menjadi lebih terfokus yaitu untuk mengetahui peran Pemerintah daerah dan pengembangan desa wisata Lawang, dan desa Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan dalam Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari Sungai Batang dalam Pengembangan nagari wisata Sungai Batang Kabupaten Agam?
2. Apa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari dalam Penerapan Kebijakan yang telah dibuat ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang ini peneliti capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi Peran Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari dalam Pengembangan pengembangan nagari wisata Sungai Batang Kabupaten Agam?
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari dalam penerapan kebijakan yang dibuat ?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Manfaat Akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah kabupaten dalam mengembangkan nagari wisata

- b. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar mengetahui terkait peran pemerintah kabupaten dalam pengembangan nagari wisata

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan stakeholder yang terlibat pada pengembangan nagari wisata.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah Kabupaten Agam hal kaitannya pada pengembangan nagari wisata.

